

Konstruksi Organisasi: Penataan Kelembagaan Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA)

Dewi Amanatun Suryani¹, Erni Saharuddin^{2*}

1Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

2Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta

*Email: dewiamanatunsuryani@unisayogya.ac.id ; ernisaharuddin@unisayogya.ac.id

Abstrak

Keywords:
Organisasi,
Kelembagaan,
Kewirausahaan,
‘Aisyiyah

Penataan Kelembagaan Sekolah Wirausaha Aisyiyah (SWA) bertujuan untuk membantu penataan kelembagaan yang profesional dan membangun koordinasi antar struktur Aisyiyah yang lebih baik. SWA dimaksudkan untuk membangun jiwa kewirausahaan dan mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan. Kota Yogyakarta menjadi pilot project Majelis Ekonomi dan Ketengakerjaan Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah (MEKPPA) dalam menjalankan programnya. Selama 4 (empat) tahun berjalan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Kota Yogyakarta tidak memiliki komitmen untuk menggerakkan program SWA dan tidak memahami peran dan tanggungjawabnya. Target luaran dari kegiatan ini adalah adanya penataan kelembagaan Sekolah Wirausaha ‘Aisyiyah (SWA) yang lebih baik dan profesional mengasus pada 4 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah diskusi terarah dan workshop. Hasil dari pelaksanaan FGD dan workshop ini adalah terbentuknya penyempurnaan panduan SWA yang memuat bagan struktur organisasi pengelola SWA di daerah beserta ketugasan masing-masing tiap jabatan. Selain itu, MEKPPA masih perlu memberikan pendampingan dan menjalankan koordinasi kepada PDA dalam pelaksanaan penyelenggaraan SWA.

1. PENDAHULUAN

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nyadalambarisan yang teratur, merekaseakan-akansepertisuatubangunan yang tersusun kokoh”, Firman Allah dalam Qs As Shaff ayat 4 ini merupakan bagian dari landasan gerak organisasi ‘Aisyiyah dalam dakwah gerakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Gerakan dakwah ini dipelopori oleh KHA Dahlandandidirikan pada tanggal 19 Mei 1917. Pada masa awal organisasi ini gerakan dakwah dilakukan melalui sektor pendidikan dan kesehatan serta pelayanan sosial. Menghadapi tantangan yang makin kompleks, Muktamar ke-47 di Makassar telah menggariskan program unggulan diantaranya penguatan kapasitas kepemimpinan dan ideologi, manajemen organisasi, dan penguatan cabang ranting. Sedangkan pada bidang ekonomi, program nasional prioritas dan unggulan diarahkan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan mendorong usaha-usaha produktif atau pemberdayaan ekonomi di masyarakat bawah. Memasuki abada kedua, penguatan dan pemberdayaan ekonomi ini menjadi pilar gerakan dakwah ‘Aisyiyah.

Data BPS mengenai angka kemiskinan dan ketimpangan yang semakin meningkat menimbulkan keprihatinan. Fenomena ini menjadi bahasan bagi para pengambil kebijakan dengan alasan bahwa selama beberapa dasawarsa (1970 -1990-an) atau pemerintahan Orde Baru, Indonesia mencatat rata-rata laju pertumbuhan ekonomi 6% - 7% per tahun, yang

menjadikan salah satu dari sedikit negara yang mampu mencapai laju pertumbuhan yang relatif tinggi. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut tidak diikuti dengan perbaikan dalam distribusi pendapatan, dan pola ketimpangan di Indonesia tidak banyak mengalami penurunan. Kedua, sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997, Indonesia membuat kemajuan besar dalam mengentaskan kemiskinan absolut diukur dari tingkat konsumsi. Namun krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 menunjukkan bahwa betapa rentannya kemajuan yang telah dicapai Indonesia. Hal ini menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat secara tajam dan berjuta-juta penduduk kembali jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Hasil penelitian Sudarlan (2015) terhadap teori Kuznets tentang Hubungan antara pertumbuhan dan ketimpangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan menyebabkan ketimpangan meningkat kemudian menurun dengan adanya proses pembangunan ekonomi ternyata tidak terbukti untuk data 30 propinsi di Indonesia. Selama lebih empat dekade pembangunan ekonomi Indonesia, ketimpangan pendapatan fluktuatif meskipun secara nasional cenderung meningkat. Kebijakan pemerintah dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan tetapi ketimpangan pendapatan makin meningkat, artinya bahwa pertumbuhan yang dicapai hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia saja. Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DIY mencapai 13,1% atau tertinggi se-Pulau Jawa. Selain memiliki angka kemiskinan yang tertinggi se-Jawa, DIY juga memiliki angka ketimpangan pendapatan tertinggi secara nasional. Kesenjangan antara kaya dan miskin di DIY paling tinggi, yaitu 0,43 dibanding rasio nasional 0,3.

Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan 'Aisyiyah Pimpinan Pusat Aisyiyah (MEKPPA) mengemban misi antara lain mengembangkan, meningkatkan, dan memberdayakan ekonomi masyarakat, baik melalui pengembangan wirausaha maupun pelatihan ketrampilan dan jaringan usaha. Selain itu, melakukan pendampingan terhadap tenaga kerja perempuan, baik di dalam maupun luar negeri, sehingga memiliki pemahaman dan mendapatkan haknya sebagai buruh, serta mendapat perlindungan hukum. yaitu mengembangkan model pemberdayaan ekonomi melalui gerakan Bina Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA), koperasi, dan menumbuhkan semangat kewirausahaan (*entrepreneur*) bagi masyarakat melalui Sekolah Wirausaha 'Aisyiyah (SWA).

Berangkat dari kajian permasalahan kemiskinan di Indonesia dan mencari alternatif bagi pemecahan masalah akibat dampak yang terjaditerutama bagi perempuan, Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah mendirikan SWA pada tanggal 5 November 2013 dengan Kota Yogyakarta sebagai *pilot project*. Pemilihan daerah ini didasarkan pada kedekatan jangkauan dari Pimpinan Pusat 'Aisyiyah untuk melakukan koordinasi dan kemudahan akses bagi akselerasi pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan SWA yang telah berjalan selama 4 (empat) tahun ini tidak serta merta mendorong Pimpinan Daerah Aisyiyah untuk mengambil peran sebagai pengelola SWA. Tatakelola kelembagaan SWA sepenuhnya masih dilakukan oleh MEKPPA dan pelaksanaannya masih sebatas berjalan belum dilaksanakan secara profesional. Kegiatan SWA tidak mengacu pada asas-asas manajemen sebagaimana dikemukakan Ulber Alfonsius Silalahi (2017) diantaranya mencakup proses dari fungsi-fungsi, pelaksanaan tugas-tugas, penggunaan sumber-sumber, pencapaian tujuan organisasi, dan dalam lingkungan yang berubah. Berdasarkan pengklasifikasian fungsi-fungsi organisasi sebagaimana dikemukakan oleh orang pertama yang mengenalkan yaitu Henry Fayol antara lain *planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling* maka muncul banyak varian fungsi-fungsi manajemen. Untuk mengetahui pola kelembagaan SWA ini acuan yang digunakan berdasarkan pada pendapat George Terry yaitu *planning, organizing, actuating, dan controlling*. Penjelasan dari teori GR Terry dalam Tona Aurora Lubis dkk (2015) bahwa pengertian perencanaan adalah *adalah* suatu kegiatan yang ditentukan sekarang, akan dilaksanakan pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana harus memperhitungkan 3 hal yaitu : kondisi masal lalu, keadaan sekarang danantisipasi masa yang akan datang. Pengertian pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, serta pengaturan dari

berbagai macam kegiatan usaha yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan, menyuruh orang melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Penggerakan (actuating) berarti indakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok (keluarga) berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Sedangkan pengertian pengawasan (controlling) sebagai proses untuk mengeliminir apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bila perlu menerapkan tindakan- tindakan korektif sehingga pelaksanaan sesuai rencana. Berdasarkan analisis terhadap SWA maka fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasi, penggerakan, dan pengawasan belum optimal dilaksanakan.

2. METODE

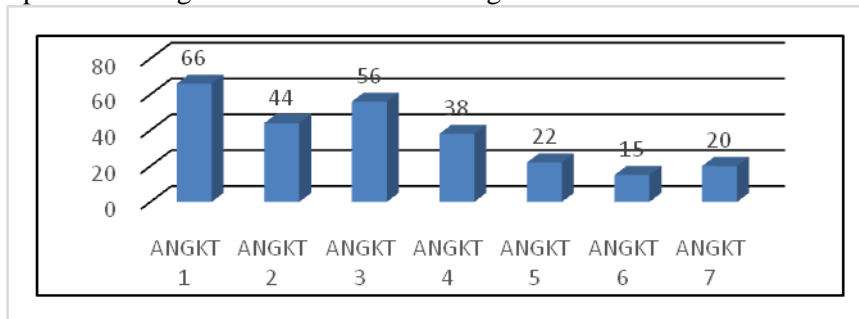
Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan metode Diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) dan workshop. Menurut Irwanto (2007) FGD merupakan suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2017 – Januari 2018. Pada bulan Oktober -November 2017 melakukan studi pustaka terkait dokumen pedoman dan data administratif pembelajaran SWA. Bulan November dilakukan FGD tentang pemetaan permasalahan pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan SWA. Bulan Desember- Januari dilaksanakan workshop pedoman tata kelola Sekolah Wirausaha Aisyiyah yang mengacu pada 4 (empat) fungsi manajemen tersebut diatas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan ekonomi yang dipengaruhi oleh ciri liberal dan kapitalistik global membawa dampak makin melemahnya perekonomian masyarakat di level bawah. Hubungan segitiga (*triangle*) pertumbuhan, kemiskinan dan ketimpangan merupakan hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya dinikmati oleh sebagian kecil kelompok masyarakat atau sekitar 20 persen golongan berpendapatan tinggi tetapi menguasai hampir 50 persen pertumbuhan. Kelompok ini yang menguasai faktor-faktor produksi penting seperti modal dan memiliki sumber daya manusia dengan produktifitas tinggi. Sehingga merekalah yang sebagian kecil kelompok masyarakat yang menikmati sebagian besar pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan semakin tinggi (Sudarlan, 2015)

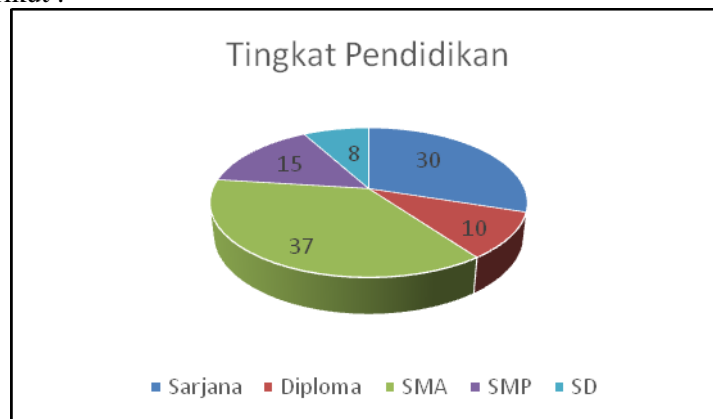
Yogyakarta merupakan tempat kelahiran Muhammadiyah dan Aisyiyah. Kota kecil ini memiliki luas 32,5 km atau 1,02% dari keseluruhan luas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (SIK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km². Jumlah penduduk kota Yogyakarta pada tahun 2013 sebanyak 402709 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 195.704 dan jumlah perempuan sebanyak 207.005. Keterbatasan lahan dan pekerjaan yang tersedia bagi perempuan menimbulkan permasalahan kemiskinan dan berbagai dampak lainnya yang ditimbulkan. Berdasarkan data Susenas, Tingkat kemiskinan di daerah perkotaan lebih kecil daripada di pedesaan namun jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih besar daripada pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena meningkatnya arus urbanisasi dari pedesaan ke perkotaan yang menyebabkan jumlah penduduk kota meningkat pesat. Kendati secara aspek wilayah Kota Yogyakarta bukanlah paling sedikit diantara kelima Kabupaten/Kota di DIY, jumlah penduduk usia kerja masih diatas Kulon Progo dengan mengalami peningkatan dari 310.999 ditahun 2010 menjadi 325.322 di tahun 2013. Pertumbuhan UMKM di DIY terbanyak di sektor perdagangan yaitu sebesar 63.025 dan paling sedikit pada aneka usaha sebesar 47.808. Perkembangan wirausaha baru di DIY sebanyak 16.421 dengan sumbangan dari Yogyakarta sebanyak 4.643 atau 28,27% dari seluruh wirausaha baru.

Potensi dan permasalahan ekonomi di kota Yogyakarta merupakan tantangan bagi Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah dalam mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan meningkatkan jumlah wirausaha baru terutama bagi kemandirian perempuan. Sampai saat ini SWA telah menghasilkan 261 warga belajar. Jumlah warga belajar mengalami fluktuatif dan cenderung menurun sejak dibuka untuk angkatan pertama sebagaimana tercantum dalam grafik berikut :



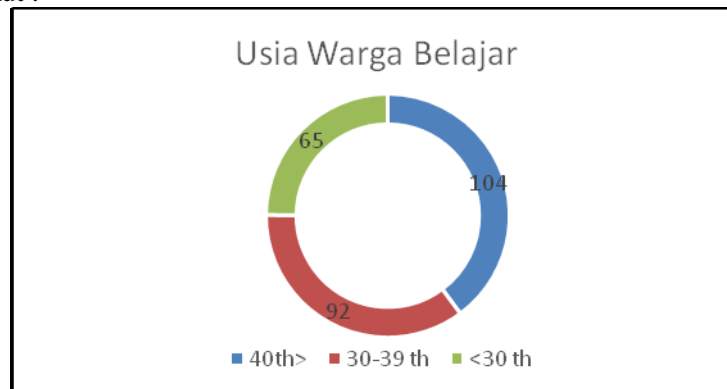
Gambar 1. Jumlah warga belajar SWA

Berdasarkan jenis usaha warga belajar SWA 80% masih bergerak pada usaha reseller. Selebihnya bergerak pada usaha kuliner dan fashion. Tingkat pendidikan berdasarkan urutan terbanyak adalah SMA (37%) dan lulusan SD paling sedikit (8%) sebagaimana digambarkan dalam grafik berikut :



Gambar 2. Tingkat Pendidikan Warga Belajar SWA

Usia warga belajar terbanyak berusia 40 tahun keatas (40%) sedangkan usia 30 tahun - 39 tahun sebanyak 35% dan dibawah 30 tahun sebanyak 25% sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :



Gambar 3. Usia Warga Belajar SWA

Kompleksitas kondisi warga belajar menjadi tantangan bagi pengelola SWA dalam menyusun materi dan metode pembelajaran. Berdasarkan panduan SWA, kurikulum pembelajaran SWA mengalami perubahan materi dan jumlah pertemuan. Pembelajaran angkatan pertama merupakan kurikulum awal dan tahapan ujicoba materi. Mulai pembelajaran angkatan 5 (lima) materi pembelajaran sudah terstruktur dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Struktur Kurikulum Pembelajaran SWA

No	Target Kompetensi	Target Pembelajaran	Materi Pembelajaran	Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Standar Pemateri
1.	Spiritual dan mental bisnis	Warga Belajar memiliki fondasi spiritual dan mental dalam menjalankan usaha	Kewirausahaan <ul style="list-style-type: none"> • Dasar spiritual dalam bisnis • Membangun kekuatan mental bisnis 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	3 JPL	Narasumber yang memiliki kemampuan memotivasi dan memiliki pemahaman bisnis dengan dasar keislaman dan kemuhammadiyah an yang kuat.
2.	Merencanakan Usaha	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam merencanakan dan merancang usaha dengan mempertimbangkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman	Merencanakan Usaha I <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan pilihan usaha • Menentukan target pasar • Merancang jadwal start up usaha Merencanakan Usaha II <ul style="list-style-type: none"> • Menghitung kebutuhan modal • Menentukan sumber modal • Merancang cash flow 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi 3. Praktek	2 JPL 2 JPL	Narasumber yang memiliki kemampuan teoritis dan praktis dalam membuat rencana usaha berdasarkan analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman
3.	Manajemen Produksi/ operasi	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam menentukan alur proses produksi, merencanakan kebutuhan alat produksi dan bahan, mekanisme penyediaannya dan pengendalian kualitas produk	Merencanakan Proses Produksi/operasi <ul style="list-style-type: none"> • Memahami dasar-dasar produksi • Menyusun alur proses produksi • Menentukan bahan baku dan alat produksi • Merancang arus bahan 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi 3. Praktek menyusun alur	2 JPL	Narasumber yang memiliki kemampuan teoritis, praktis dan memahami alur proses produksi serta sumber bahan baku produk

			baku dan ketersediaannya • Pengendalian kualitas		
4.	Pembukuan usaha	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam mencatat keuangan usaha, menghitung biaya dan keuntungan usaha.	<p>Pembukuan Usaha I</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengantar pengelolaan keuangan usaha • Memahami transaksi – transaksi • Menyusun buku kas/ buku keuangan harian dan bulanan <p>Pembukuan Usaha II</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun data persediaan • Menyusun laporan laba/rugi • Menyusun neraca 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi 3. Praktek 	<p>Narasumber yang memiliki kemampuan teori dan praktis dalam pembukuan dan menyusun laporan keuangan usaha</p> <p>2 JPL</p> <p>3 JPL</p>
5.	Kemampuan mengatasi masalah usaha	Warga Belajar memiliki semangat dalam menjalankan usaha, pantang menyerah dan dapat mengatasi permasalahan usaha	<p>Kesalahan dalam Usaha (7 Kesalahan Pengusaha Pemula)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami kesalahan yang dilakukan pelaku usaha pemula • Mengatasi permasalahan usaha dengan benar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi 	<p>Narasumber yang memiliki pengalaman dalam usaha dan memahami langkah penyelesaian masalah usaha</p> <p>2 JPL</p>
6.	Pemasaran Produk	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam menetapkan target konsumen, mendapatkan konsumen, memasarkan	<p>Pemasaran Produk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menentukan target konsumen • Menentukan kebutuhan konsumen • Menentukan harga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi 3. Roleplay 	<p>Narasumber yang memiliki pengalaman praktis dalam memasarkan produk serta memahami secara teoritis konsep pemasaran produk.</p> <p>3 JPL</p>

		produk dan memperluas pasar	produk <ul style="list-style-type: none"> • Membuat jalur distribusi produk • Menyusun program pemasaran (offline maupun online) 		
7.	Membangun Jejaring Usaha	Warga Belajar memiliki kemampuan dalam membangun jaringan usaha	Membangun Jejaring Usaha <ul style="list-style-type: none"> • Memahami konsep distribusi • Memahami beberapa bentuk jaringan usaha • Menentukan jaringan usaha yang tepat • Teknik negosiasi 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	Narasumber yang memiliki pengalaman praktis dalam membangun jejaring usaha 2 JPL
8.	Ke 'Aisyiyahan	Warga Belajar dapat memahami tentang gerakan 'Aisyiyah	Ke 'Aisyiyahan <ul style="list-style-type: none"> • Sejarah Organisasi 'Aisyiyah • Amal Usaha 'Aisyiyah • Pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad ke -2 	1. Penyampaian materi di kelas 2. Diskusi	Pimpinan 'Aisyiyah 2 JPL
9.	Kunjungan Usaha	Warga Belajar memiliki kemampuan / gambaran dalam menjalankan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kunjungan Usaha • Mentoring 	1. Berbagi Pengalaman Usaha 2. Tanya Jawab	Mentor yang berpengalaman dalam membangun usaha kreatif dan memiliki inovasi

Pelaksanaan pembelajaran sampai angkatan 6 (enam) sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan di kelas ditambah 2 kali kunjungan usaha. Sedangkan pada angkatan 7 (tujuh) dimulai dengan 4 (empat) kali pertemuan terdiri dari dua sesi dengan hitungan per jam pelajaran (jpl) adalah 45 menit. Problem utama dari pembelajaran sudah dapat teratasi dengan adanya kurikulum yang memadai namun dalam perkembangannya warga belajar membutuhkan pengetahuan tentang hal-hal teknis terkait pemasaran dan perizinan. Dari hasil fgd, pengelola SWA menambahkan materi foto produk dan perizinan usaha sebagai materi tambahan dari kurikulum pembelajaran yang sudah ada. Selain pembenahan materi pembelajaran SWA, hasil workshop pengelolaan SWA menemukan beberapa hal sebagai berikut :

3.1. Perencanaan

Pembelajaran SWA diawal pembentukannya dirancang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam setahun. Namun demikian dalam pelaksanaannya hanya dapat dilaksanakan 2 (dua) bahkan sekali dalam setahun. Hasil workshop SWA terkait perencanaan pembelajaran dan pengorganisasian SWA. Kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran SWA diantaranya keterbatasan SDM dan ketersediaan anggaran. MEKPPA sudah melibatkan pimpinan wilayah dan pimpinan Daerah Aisyiyah dalam menyusun rencana namun demikian tidak semua personil yang terlibat dapat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran maupun pengelolaan SWA.

Berdasarkan hasil workshop pengelolaan SWA telah dirumuskan rencana pengembangan SWA sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Pengembangan SWA

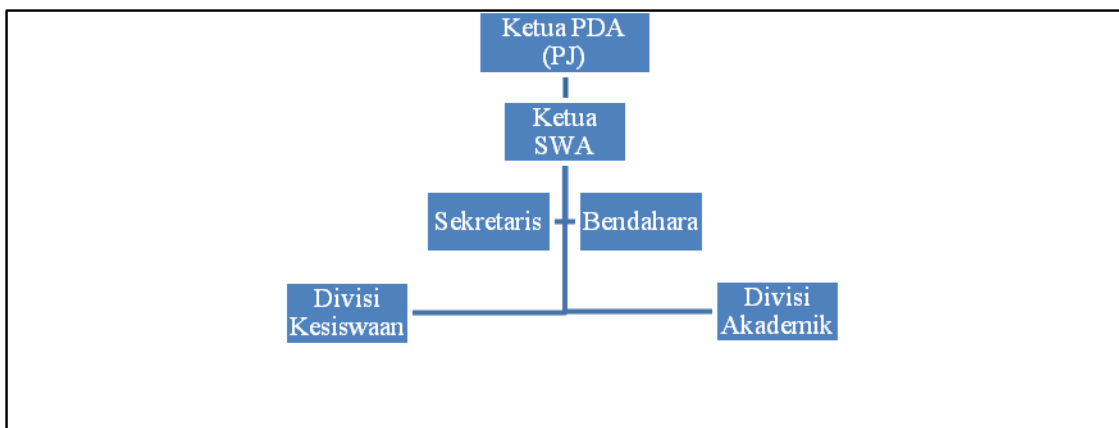
No	Uraian	Waktu	Penanggung jawab
1	Pembentukan Pengelola SWA Kota	Minggu ke 4 Desember 2017	PWA-PDA
2	Raker Alumni SWA	Januari 2018	Pengurus Alumni SWA
3	Pembuatan Kartu Anggota SWA	Januari 2018	MEKPPA
4	Diskusi Tematik	Februari 2018	MEKPPA dan Alumni SWA
5	Jambore SWA (Instruktur, Mentor, Warga belajar)	November 2018	MEKPPA dan alumni SWA
6	Gerai Produk Alumni SWA	Maret 2018	MEKPPA dan alumni SWA
7	Pembelajaran SWA	Februari dan Agustus	Pengelola SWA Kota
8	Promosi (Publikasi, berita) ml media massa	Mulai Januari 2018	Pengelola SWA Kota
9	Evaluasi materi pembelajaran SWA	April dan Desember 2018	MEKPPA dan Pengelola SWA Kota
10	Jejaring kerjasama dengan PNM, Wardah dan Bank Mandiri	Februari 2018	MEKPPA

Rencana pengembangan ini hampir tidak terlaksana sebagaimana direncanakan. Personil yang diminta sebagai pengelola SWA tidak bisa menindaklanjuti dikarenakan kesibukan masing-masing. Ketua pengelola SWA yang berasal dari alumni SWA yang lebih banyak berperan untuk melaksanakan dengan jumlah personil SDM yang terbatas. Dalam waktu singkat untuk memenuhi target pembelajaran angkatan 8 (delapan) telah diupayakan melalui sosialisasi pada pertemuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Aisyiyah Yogyakarta, sosialisasi pada pengajian Aisyiyah tingkat Cabang, penyampaian surat edaran dari Ketua Pimpinan Daerah ke seluruh cabang untuk mengirimkan peserta, dan menyebarkan informasi pendaftaran melalui media sosial.

3.2. Pengorganisasian

Pengelolaan SWA tidak dapat berhasil tanpa pengorganisasian yang baik. Panduan SWA belum menunjukkan bagaimana struktur organisasi pengelola SWA dibentuk. Banyak pertanyaan dari daerah yang ditujukan kepada MEKPPA terkait hal ini termasuk peran PDA yang secara eksplisit belum disebutkan dalam Panduan SWA. Berdasarkan penelusuran dokumen program kegiatan MEKPPA ditemukan bahwa peran dan fungsi PDA terdapat pada Tanfidz Keputusan Aisyiyah tentang panduan program kerja MEKPPA dalam pelaksanaan SWA. Sedangkan struktur organisasi mengacu pada pelaksanaan kegiatan SWA. Tata kelola di tingkat PDA ini yang menjadi temuan dalam

workshop tatakelola SWA yang menjadi masukan dalam penyusunan pedoman pengelolaan SWA. Soekanto dalam Mhd. Syahwan Koto (2017) membagi struktur organisasi menjadi lima kelompok yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi proyek, struktur organisasi matriks, struktur organisasi usaha (ventura) dan struktur organisasi tim kerja (*task force*). Dari kelima bentuk ini, struktur organisasi pengelola SWA mengacu pada struktur organisasi tim kerja yang terdiri dari :



Gambar 4. Struktur Organisasi Pengelola SWA

Jabatan Ketua, Sekretaris dan Bendahara sudah dapat dipahami oleh pejabat pengelola SWA pada kepengurusan yang baru terbentuk untuk persiapan SWA angkatan 8 sedangkan divisi akademik dan kesiswaan masih perlu penjelasan. Hasil workshop menyebutkan bahwa tugas divisi akademik meliputi penyiapan materi pembelajaran, menghubungi instruktur dan mentor, dan kegiatan administratif pembelajaran. Tugas Kesiswaan adalah mengkoordinir pendaftaran warga belajar, melayani kebutuhan warga belajar, dan menghimpun alumni warga belajar. Kedua tugas dan fungsi divisi ini sampai saat ini belum berjalan optimal sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran dan penghimpunan alumni masih dikerjakan secara tim.

3.3. Penggerakan

Organisasi 'Aisyiyah identik dengan organisasi gerakan pemberdayaan perempuan. Memasuki abad ke-2 gerakan Aisyiyah sudah menjangkau Internasional dengan adanya Aisyiyah cabang khusus di Malaysia, Mesir dan Taiwan. Aisyiyah berdiri di masa penjajahan dimana perempuan selalu ditempatkan di sisi tidak pas dalam kondisi ketertinggalan dan kebodohan. Keadaan yang kurang menguntungkan itu masih ditambah oleh paham budaya yang menempatkan perempuan tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang dipahami oleh KHA Dahlan. Sehingga pandangan keIslamanpun pada saat itu masih menempatkan perempuan pada posisi kedua. Padahal Kyai dan Nyai Dahlan bersama para tokoh di awal Muhammadiyah berdiri memiliki pandangan keIslaman yang berkemajuan. Dimana Muhammadiyah meyakini jika nilai-nilai ajaran Islam itu menempatkan posisi perempuan sama mulianya dnegan posisi laki-laki dan yang membedakan antara perempuan dan laki-laki adalah ketaqwaannya. Aisyiyah berpandangan bahwa perempuan punya potensi yang diberikan Allah guna beribadah, berkarya secara luas, baik untuk diri, keluarga, maupun kepentingan kemanusiaan universal (Republika, 2017)

Implementasi keberpihakan Aisyiyah pada perempuan dilakukan melalui Sekolah Wirausaha Aisyiyah. Sejak awal SWA dibentuk sebagai bagian dari gerakan pemberdayaan perempuan dengan menumbuhkan semangat kewirausahaan dan mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan. Struktur organisasi pengelola SWA tidak terpisah dari Ketua Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) sebagai penanggung jawab. Tugas PDA dituangkan dalam Program Kerja MEKPPA antara lain melakukan pembelajaran

SWA, memfasilitasi mentoring warga belajar, memfasilitasi klinik konsultasi bisnis SWA, melakukan temu alumni SWA, melakukan gelar produk warga belajar dan alumni SWA, melakukan monitoring dan evaluasi untuk menganalisis keberhasilan kegiatan yang sudah berjalan, dan menyampaikan laporan dalam bentuk hardcopy maupun softcopy secara periodik tentang kegiatan yang sudah berjalan dan kendala yang dihadapi di lapangan ke Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat 'Aisyiyah (MEKPPA).

Hasil workshop pengelolaan SWA menunjukkan bahwa PDA tidak melaksanakan tugas dengan baik. Keberadaan SWA di Kota belum menjadi bagian dari gerakan yang dilakukan di daerah. Komitmen untuk melaksanakan SWA secara sungguh-sungguh tidak terwujud sehingga jumlah peserta semakin menurun dan pengelolaan SWA lebih banyak ditopang oleh MEKPPA. Pengelola SWA belum memahami tugas yang harus dilakukan dalam penjangkaran warga belajar SWA dan cenderung bersifat pasif. Kendati instruktur dan mentor disediakan oleh MEKPPA belum muncul inisiatif pengelola untuk mengembangkan materi dan metode pembelajaran hingga pendampingan bagi alumni SWA. Ketidapahaman PDA berimbas pada pengelola SWA yang tidak optimal. Gerakan pemberdayaan perempuan melalui SWA substansinya adalah gerakan advokasi. Menurut Teuku Zulyadi (2014) advokasi merupakan upaya untuk mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggungjawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperanserta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara. Aisyiyah mengajak pimpinan di semua tingkatan untuk berkoordinasi mewujudkan misi Aisyiyah. Oleh karena itu tindak lanjut dari workshop adalah penyempurnaan panduan pelaksanaan SWA dengan memasukkan struktur organisasi dalam bentuk bagan disertai keterangan mengenai ketugasan masing-masing jabatan.

3.4. Pengawasan

Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya mengevaluasi program SWA. Arikunto dan Jabar dalam Ashiong P. Munthe (2015) menyatakan bahwa tujuan diadakannya evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program. Evaluasi ini meliputi kinerja pengelola SWA dan pengawasan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Panduan SWA yang memuat sistem pengendalian belum dipahami pengelola SWA. Sehingga pendampingan instrumen pengawasan menjadi tindak lanjut pada hasil workshop pengelolaan SWA. Sistem pengawasan termuat dalam panduan SWA. Tiga hal dalam pengendalian meliputi monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Monitoring bertujuan untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan agar dapat secara langsung dan sedini mungkin dilakukan koreksi jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan rencana. Cara pelaksanaannya dengan memberikan form evaluasi pembelajaran SWA kepada warga belajar dan pengelola SWA serta struktural pimpinan Aisyiyah dari Pusat hingga Daerah. Evaluasi merupakan rangkaian kegiatan penilaian dan pengukuran terhadap pengambil kebijakan, pelaksana teknis maupun terhadap seluruh proses kegiatan pembelajaran SWA. Penilaian dilakukan oleh Pengelola SWA dan pimpinan struktural Aisyiyah dari Pusat sampai Daerah berkaitan dengan input, hasil setiap tahapan maupun tenaga pelaksana. Pelaporan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian laporan pembelajaran SWA yang telah dilakukan maupun yang akan dilaksanakan. Subtansi laporan meliputi input kegiatan, seluruh pelaksanaan pada setiap tahapan kegiatan, keberhasilan yang dicapai baik pada setiap tahap kegiatan maupun hasil dari seluruh kegiatan, dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan.

4. KESIMPULAN

Pengelolaan SWA di Kota Yogyakarta pada dasarnya sudah berjalan namun belum optimal. Dari FGD dan workshop tentang fungsi manajemen diperoleh hasil bahwa perencanaan program SWA belum tertata dengan baik. Materi dan metode pembelajaran sudah tersedia namun pada tahap pelaksanaan tidak berjalan sesuai harapan. Proses

pendaftaran peserta tidak direncanakan secara efektif sehingga jumlah warga belajar SWA cenderung mengalami penurunan. Alumni SWA kurang mendapat perhatian sehingga tahapan pengembangan SWA belum mengarah pada tujuan yang diharapkan. Pengorganisasian SWA belum menunjukkan pembagian peran yang jelas. PDA tidak memahami tugas ketugasannya dalam menggerakkan roda organisasi dan tanggungjawabnya untuk menyelenggarakan SWA di Kota Yogyakarta. Dalam hal pengawasan, pengelola belum memahami bagaimana proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Sehingga pemahaman terhadap keempat fungsi manajemen ini hendaknya dipahami pengelola SWA sebagai satu kesatuan fungsi manajemen untuk mencapai tujuan SWA yaitu menodornng tumbuhnya jiwa kewirausahaan dan meningkatkan jumlah perempuan sebagai pengusaha yang mandiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Rektor Universitas Aisyiyah Yogyakarta cq. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang telah membiayai PKM kolaboratif ini. PKM kolaboratif Dosen dengan Mahasiswa dan Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah ini dalam rangka pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi bagi kemajuan perempuan Indonesia yang mandiri dan berkeadilan gender.

REFERENSI

- Irwanto (2007). *Focus Group Discussion*. Jakarta: Yayasan Obor
- Ulber Silalahi (2017). *Asas-asas Manajemen*, Bandung: Refika Aditama
- Majelis ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah (2016), *Panduan SWA*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah
- Majelis ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat Aisyiyah (2016), *Panduan Program*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Rancangan RKPD Tahun 2016
- Pimpinan Pusat Aisyiyah (2016). *Tanfidz Keputusan Mukhtar Aisyiyah di Makasar*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah
- Ashiong P. Munte. (2015), Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat, *Jurnal Scholaria*, Vol 5, No.2
- Mhd. Shafwan Koto. (2017), Fungsi Organisasi Dalam Manajemen Proyek, *Jurnal Ilman*, Vol. 5, No. 1, (pp. 8-14)
- Sudarlan. (2015), Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Eksis*, Vol.11 No.1, (p 3036 – 3213)
- Teuku Zukyadi. (2014), Advokasi Sosial, *Jurnal Al Bayan*, Vol. 21, No. 30 (p.2)
- Tona Aurora Lubis ,Zulkifli, Erwita Dewi. (2015), Peningkatan Keterampilan Manajemen dan Softskill Penjual Jamu Gendong di Kota Jambi, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 30, Nomor 3